

**EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LAE GECIH KECAMATAN
SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH 2017-2022**

SKRIPSI

OLEH:

SITI NURICA TUMANGGER

198510029



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/4/24

**EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LAE GECIH
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH 2017-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas**

Medan Area



OLEH

SITI NURICA TUMANGGER

198510029

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA :Siti Nurica Tumangger
NPM :198510029
JUDUL :EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LAE GECIH
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH 2017-2022

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Tanggal _____



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal _____

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Elnita Juliana Hasibuan, M.Si

Tanggal _____



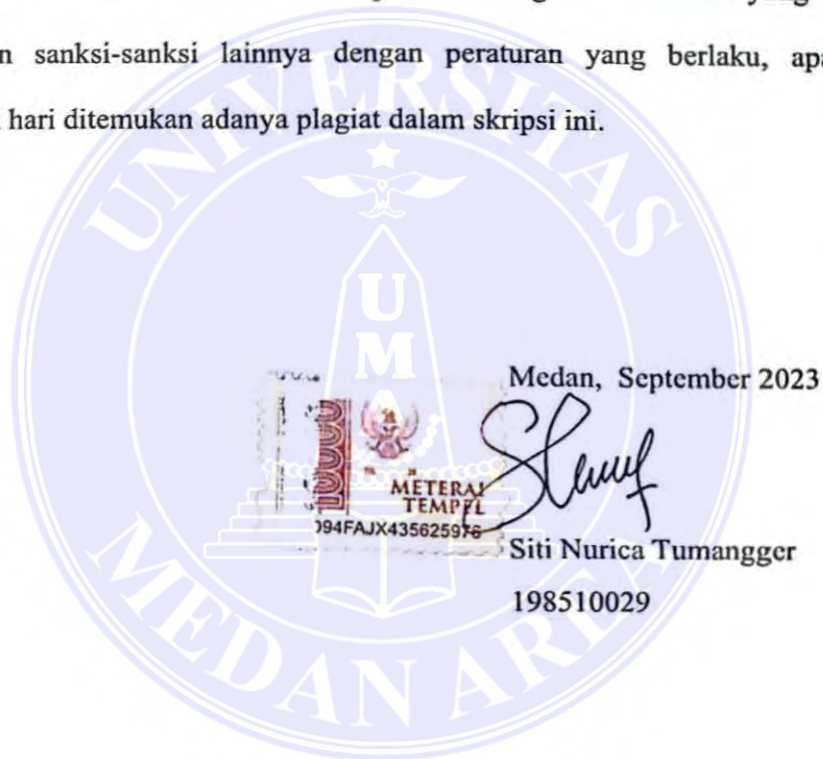
Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si

Tanggal _____

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurica Tumangger
NPM : 198510029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non – exclusive Royalty – Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh 2017-2022.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir /skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta danm sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2023

Yang menyatakan



Siti Nurica Tumangger

198510029

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LAE GECIH KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH 2017-2022

Penelitian didasari Pembangunan Infrastruktur Desa Lae Gecih, pemerintahan belum sepenuhnya mampu menjalankan pembangunan dengan baik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih tahun 2017-2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan terdiri dari informan kunci, utama dan tambahan. Teknik pengumpulan dataa menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini indikator efektivitas menurut Strees yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Lae Gecih sudah cukup berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNMENT IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN LAE GECIH VILLAGE, SIMPANG KANAN DISTRICT, ACEH SINGKIL REGENCY, ACEH PROVINCE 2017-2022

The research is based on Lae Gecih Village Infrastructure Development, the government has not been fully able to carry out development properly. The study aims to determine the effectiveness of village governments in infrastructure development in Lae Gecih Village in 2017-2022. The research uses qualitative methods and consists of key, primary and auxiliary informants. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation techniques. The theory used in this study is an indicator of effectiveness according to Strees, namely: goal achievement, integration, and adaptation. The results showed that the Infrastructure Development Program in Lae Gecih Village was running quite well.

Keywords: Effectiveness, Village Government, Infrastructure Developmen

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Nurica Tumangger, anak dari Bapak Kuaso Tumangger dan Ibu Relianna Berutu. Penulis lahir di Lae Gecih 23 Maret 2001 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Tuhtuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan lulus tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan lulus pada Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi lulus tahun 2019. Setelah itu pada tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan Kuliah di Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan kebijakan serta rahmat karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam Menyusun dan menyelesaikan Seminar Hasil ini dengan baik. Seminar Hasil ini berjudul “Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh 2017-2022”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Seminar Hasil ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada:

1. Bapak dan Mamak saya tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-henti yang diberikan oleh kedua orang tua penulis beserta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan saran serta motivasi untuk mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi dengan baik.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing II atas segala kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan skripsi yang selalu bersifat membangun terhadap penulis.
4. Bapak Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom selaku sekretaris yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Bapak/Ibu Dosen serta staff Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi.
8. Pengurus kantor kepala desa dan masyarakat desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepada seluruh keluarga khususnya Abang dan Adik saya yang tercinta yang selalu memberi semangat dukungan doa yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya selama berada jauh dari orang tua khususnya Kristina Sinaga dan Lifia Astrina yang telah memberikan banyak hal tentang kehidupan mendorong dan memberikan motivasi, semangat terhadap penulis beserta masukan untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini terhadap penulis.

Medan, September 2023



Siti Nurica Tumangger
Siti Nurica Tumangger

NPM: 198510029

x

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Identifikasi Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Teori Efektivitas	7
2.1.1 Pengertian Efektivitas	7
2.1.2 Ukuran Efektivitas	10
2.2 Desa	13
2.3 Pemerintah Desa.....	16
2.3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	19
2.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa	20
2.3.3 Tugas dan Fungsi Kepala Urusan	21
2.3.4 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi	22
2.3.5 Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan.....	23
2.4 Pembangunan	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
2.6 Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian	36
1. Informan Kunci	36

2.	Informan Utama	37
3.	Informan Tambahan	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38
1.	Wawancara	38
2.	Observasi	39
3.	Dokumentasi	39
3.5	Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Visi dan Misi Kantor Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh	44
4.1.2	Struktur Organisasi Kantor Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh	44
4.2	Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh 2017-2022	45
4.3	Hasil Wawancara	46
4.4	Pembahasan	53
4.4.1	Pencapaian Tujuan	53
4.4.2	Integrasi.....	54
4.4.3	Adaptasi	55
BAB V PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Berpikir	34
4.1 Gambar Peta Desa Lae Gecih	43
4.2 Gambar Bagan Struktur Kantor Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.....	45



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	29
3.1 Informan.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Observasi	58
Lampiran Pedoman Wawancara	59
Lampiran Dokumentasi.....	64
Lampiran Surat Izin Pengambilan Data	69
Lampiran Surat Selesai Pengambilan Data	70
Lampiran Daftar Riwayat Hidup Singkat	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta menyejahterakan masyarakat. Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 dijelaskan, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu kepala urusan pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut perangkat desa. Dibentuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 209 menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa “BPD” berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan Lembaga perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat

desa. Di samping itu, juga pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26, di mana Desa berhak melaksanakan pembangunan salah satunya yaitu pembangunan atau sarana prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat di desa yang layak dan memadai akan cepat berkembang, jadi dapat di tarik kesimpulannya adalah suatu kegiatan pembangunan itu diukur keberhasilan tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. (Irfan, 2006). Pemerintah yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran, hal yang harus dipikirkan pemerintah desa adalah bagaimana membangun infrastruktur yang saling terintegritas antara satu sama lain.

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai penunjang tercapainya kesejahteraan sosial dan tujuan ekonomi sosial dengan cara peningkatan pembangunan.

Siagian (2002) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang

aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pembangunan pedesaan jangka panjang yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan pedesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam atau dapat dikatakan pembangunan pedesaan ditujukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Observasi awal penulis menemukan, bahwa Desa Lae Gecih yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawit. Hasil petani yang terus meningkat tidak didukung dengan kondisi jalan yang baik, dimana jalan yang dilalui untuk membawa hasil petani menjadi penghambat perputaran ekonomi di Lae Gecih. Banyak masyarakat mengeluhkan, bahwa lambatnya pelaksanaan pembangunan jalan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di ladang atau perkebunannya.

Pembangunan fisik desa di Desa Lae Gecih masih jauh dari harapan masyarakat. Pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada pembangunan

jalan desa untuk menuju perkebunan atau ladang masyarakat. Desa Lae Gecih sendiri termasuk berada dalam lintasan jalan umum menuju lahan pertanian masyarakat desa lain. Pada beberapa bagian jalan desa menuju ke ladang atau perkebunan masyarakat belum dibuat dengan bagus dan cepat mengalami kerusakan dikarenakan banyaknya mobil *pick up* dan truk yang lalu-lalang untuk mengangkut hasil perkebunan seperti sawit serta curah hujan yang tinggi.

Pemerintahan belum sepenuhnya dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Berbagai permasalahan timbul seperti pembangunan fisik yang tidak selesai, sesuai dengan perencanaan. Selain itu, lahan untuk dijadikan tempat pembangunan kurang. Sehingga ini berakibat kepada pemerintah desa, yang kesulitan untuk melakukan pembangunan, karena ada sebagian masyarakat yang tidak ingin memberikan sedikit lahannya untuk digunakan dalam mendukung pembangunan jalan di Desa Lae Gecih.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat judul “Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tahun 2017-2022 telah berjalan efektif?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemerintah desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Aceh Singkil, Provinsi Aceh dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2017-2022?

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak selesai sesuai dengan perencanaan rencana tahun 2017-2022.
2. Persoalan hambatan pembangunan infrastruktur.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pemerintah Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2017-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tahun 2017-2022.

2. Hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata “*Effective*”, yang berarti sukses dalam kata bahasa Inggris “*Effectiveness*”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah kegunaan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan. Seseorang yang melakukan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas memiliki peran penting dalam menentukan dan mengatasi permasalahan yang menjadi target kebijakan.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang telah direncanakan. Manajemen suatu organisasi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan atau sasaran yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi perusahaan.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya adalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Gibson dikutip dari buku Herbani Pasolong (2010) efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Kumorotomo (2005) efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan

tertentu dalam suatu organisasi. Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jikalau tujuan dari organisasi atau nilai-nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi tercapai. Menurut Siagian (2002) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Kurniawan dalam bukunya yang berjudul transformasi pelayanan publik (2005) menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto (1975) dalam bukunya yang berjudul efektivitas, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi, dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang

dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy (1989) menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Sondang dalam *Othenk* (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam *Othenk* (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Pendapat para pakar di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Steers (1985) mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (1985) menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal

5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektifan dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi.

Menurut pendapat Streers mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
3. Kesiagaan yaitu penilaian yang menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.

9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.

Menurut Duncan yang dikutip Steers dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi” (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat pendekatan efektivitas menurut beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat di pergunakan dalam mengukur keefektivitasan program pemerintah desa antara lain:

- a. Menurut Gibson, Doneli dan Ivan Cefich, mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. (Gibson, Doneli, dan Ivan Cefich, Teori Efektivitas).
- b. Menurut Robbin, membagi ke dalam 4 pendekatan dalam mengukur efektivitas pemerintahan desa yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan *konstituensi* – strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Pengertian efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

2.2 Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Harman Warner Muntinge, seorang anggota Belanda dari kolonial Inggris Lard van Indie, yang merupakan asisten gubernur Inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Dalam sebuah

laporannya kepada pemerintah tertanggal 14 Juli 1817 menyatakan bahwa ada desa-desa di wilayah di pantai utara Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetarjo, 1984).

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India, “Swadesi”. Artinya tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang didiami oleh, dan mengacu pada satu kesatuan kehidupan dengan kriteria yang seragam dan batas-batas yang jelas (Soetardjo, 1984: dalam Yuliati, 2003). Menurut definisi tersebut, Indonesia memiliki banyak kesatuan masyarakat dengan istilahnya masing-masing, seperti Dusun dan Marga untuk masyarakat Sumatera Selatan, Dati dari Maluku, Nagari dari Minan, dan Wanua dari Minahasa. Di Aceh desa disebut dengan nama gampong. Di daerah lain, masyarakat setingkat desa juga memiliki konsep dan keunikan yang berbeda baik dari segi mata pencaharian maupun adat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mengotonomikan Desa dengan berbagai kemandirian pemerintah desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan berbagai kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, penyebab daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun di ramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut Widjaja dan UU tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa menurut Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut: “Penyelenggaraan Pemerintah Desa Merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati”.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Di Aceh kepala desa disebut dengan sebutan geuchik atau keuchik. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat

menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris Desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).

2. Pelaksana Kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi,

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana Teknis.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, mengadministrasikan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.3.3 Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 ayat (2) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, mengadministrasikan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.3.4 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Merujuk pada ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.3.5 Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 ayat (2) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.4 Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan Pancasila (Fandi: 2014).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti apabila perencanaan yang dibuat pemerintah haruslah dikelola dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa melalui pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. (Ritonga:2019).

Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Safi'i (2007) mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang berlangsung terus menerus di Indonesia, pembangunan desa di seluruh wilayah nusantara berorientasi pada hasil

yaitu menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam merealisasikan pembangunan nasional yang pada tahun 2017 bertitik fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, pemerintah dalam hal ini melakukan estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Hasil dari pembangunan desa yang terlaksana dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut.

Menurut Lehmanas (1997) mengatakan bahwa teori pembangunan pada awalnya adalah teori pembangunan dengan pendekatan ekonomi yang merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia, teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang ke arah pendekatan politik, sosial, budaya dan pendekatan menyeluruh pada setiap aspek kehidupan.

Pembangunan desa merupakan suatu program nasional yang dimulai sejak dulu hingga sekarang yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dilaksanakan meliputi berbagai bidang, disusun dalam program-program dan proyek proyek pembangunan. Penjabaran dari berbagai program dan proyek, dapat dirinci ke dalam kelompok program dan proyek, sebagai berikut:

1. Pembangunan di bidang pertanian secara berkelanjutan.
2. Konservasi lingkungan.
3. Pembangunan industri pedesaan.
4. Pembangunan sumber daya manusia (SDM).
5. Pembangunan infrastruktur fisik.

6. Pembangunan kelembagaan ekonomi dan sosial.
7. Pembangunan partisipasi masyarakat.
8. Lainnya (Adisasmita (2006)).

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Adisasmita (2006) mengatakan pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan di seluruh kawasan pedesaan. Pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi desa serta bertumpu pada strategi dasar tipologi pembangunan serta ditujukan pada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan wawasan nusantara.

Pembangunan pedesaan tersebar ke seluruh daerah, ternyata lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kurang diimbangi kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Dalam pembangunan pedesaan dihadapi banyak sekali hambatan diantaranya yang paling mendesak yaitu (Adisasmita, 2006):

1. Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, antar pelaku pembangunan.

2. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan pedesaan.
4. Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

Menurut Adisasmita (2006) meskipun problematika dalam pembangunan pedesaan banyak mengalami hambatan-hambatan, pembangunan pedesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan dan lingkungan pemukiman).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah pedesaan miskin).
5. Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Secara umum pembangunan pedesaan haruslah dimulai dari sarana dan prasarana dalam hal ini infrastruktur sebagai akses utama dari segala bentuk kegiatan

harus dibangun, sehingga yang menjadi orientasi pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan sesuai tujuan pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan nasional, pedesaan mempunyai peranan penting karena mencakup bagian terbesar di wilayah nusantara. Infrastruktur desa merupakan salah satu bagian integral desa yang harus dimiliki suatu desa, tanpa adanya suatu infrastruktur desa maka suatu desa akan sulit untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Di samping itu, infrastruktur di kawasan pedesaan haruslah serasi dan terpadu, dan bermanfaat di seluruh kawasan pedesaan. Dengan demikian segala akses yang memicu perkembangan potensi suatu kawasan pedesaan akan berjalan ke arah yang lebih baik.

Selama ini kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedalaman, termasuk para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung terhadap pengembangan industri, baik besar, menengah maupun industri kecil yang menyebabkan para pelaku ekonomi (pengusaha) malas untuk mengembangkan usahanya bahkan sudah sebagian yang memutuskan untuk menghentikan produksinya sehingga menciptakan pengangguran baru (Sumarto, 2010).

Sementara Grigg (1998) mengatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi teknik juga mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Sumarto (2010) juga mengatakan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan. Bila kondisi infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya jelek maka jangan berharap pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai harapan.

Infrastruktur pedesaan memiliki peranan sangat penting dalam suatu perekonomian, selain itu infrastruktur yang merupakan akses dalam semua kegiatan di setiap daerah harus bisa menjembatani setiap aktivitas perekonomian di suatu daerah khususnya wilayah pedesaan. Keterkaitan antara infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan suatu desa dapat dilihat dari sejauh mana keadaan infrastruktur wilayah pedesaan tersebut, apabila infrastruktur di wilayah pedesaan benar-benar efektif keberadaannya maka hal ini akan dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup baik.

Semua desa dianggap sama, pendekatan infrastrukturnya. Harus dibangun juga sumber daya manusianya. Bahkan sering kali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa satu dengan yang lainnya jangan dipukul rata. (Kompas.com 2017).

2.5 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengarah pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data, yang digunakan dalam pengelolaan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam proses penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir dengan harapan hasil penelitian tersaji secara akurat dan mudah untuk dipahami. Hal ini dapat dilihat dari tabel penelitian terdahulu di bawah ini:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ricky Hardian Rachmat Hidayat, Analisa penggunaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur desa (Studi kasus di Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat), 2020,	Kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik mengumpulkan data.	Pemerintah di Desa Lembuak telah menggunakan atau memanfaatkan DD untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Objek yang diteliti sama-sama dalam pembangunan infrastruktur. Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu membahas tentang analisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sementara penulis membahas tentang efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Lokasi penelitian sebelumnya adalah Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan dalam penelitian ini lokasinya di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah

					teori analisa, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas.
2.	Irfan, Peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, 2019.	Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	(1) Terdapat tiga peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di antaranya: partisipasi, transparansi, dan kesetaraan dan kewajaran; (2) Terdapat dua kendala pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya SDM yang memadai; (3) Terdapat tiga solusi dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di antaranya: peningkatan disiplin kerja, mengikuti pelatihan dan melibatkan partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama-sama dalam pembangunan. • Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas tentang Peran pemerintah desa dalam pembangunan sementara penulis membahas tentang efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian sebelumnya adalah Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan dalam penelitian ini lokasinya di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. • Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah teori peran, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas.
3.	Nirwana, Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, 2015.	Kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para informan.	Pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama-sama dalam pembangunan infrastruktur. • Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas tentang Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran sementara penulis membahas tentang efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian sebelumnya adalah Desa Su'rulangi

				metode kualitatif.	<p>Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Sedangkan dalam penelitian ini lokasinya di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah teori peran, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas.
4.	<p>Fitrah Anugrah Ritonga, Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, 2017.</p>	<p>Kuantitatif deskriptif.</p>	<p>Hasil dari penelitian diketahui tingkat efektivitas sebesar 77% yang dapat diartikan bahwa program sudah berjalan efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama-sama pembangunan infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas pembangunan desa melalui percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) sementara penulis membahas tentang efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian sebelumnya adalah Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan dalam penelitian ini lokasinya di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. • Jenis dan metode penelitian sebelumnya adalah kuantitatif deskriptif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

					<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan penelitian sebelumnya efektivitas menurut Gibson. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori indikator efektivitas menurut Streers.
5.	<p>Arlis, Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, 2020.</p>	<p>Kualitatif dengan tipe deskriptif.</p>	<p>Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup efektif hal ini dapat di lihat dari pencapaian tujuan di mana dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagian besar telah mencapai tujuan sesuai yang di tentukan mulai dari kurun waktu dalam aspek pelaksanaan pembangunan di desa tompotana hanya memerlukan waktu kurang lebih satu tahun pelaksanaan serta dari aspek sasaran juga telah mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya serta sudah di rasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun masih ada beberapa keluarga yang masih perlu di berikan bantuan pembangunan .dari aspek integrasi kepala desa juga selalu memberikan arahan dan menyampaikan kepada setiap kepala dusun untuk selalu berusaha menyukseskan pembangunan khususnya di dusun masing-masing, kepala desa juga selalu berkoordinasi kepada kepala dusun dan juga masyarakat kemudian bentuk adaptasi yang di lakukan kepala desa yaitu dari setiap pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa Tompotana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama-sama pembangunan. • Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. • Teori yang digunakan sama-sama teori efektivitas menurut Streers 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sementara penulis membahas tentang efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. • Lokasi penelitian sebelumnya adalah Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Sedangkan dalam penelitian ini lokasinya di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. • Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2.6 Kerangka Berfikir

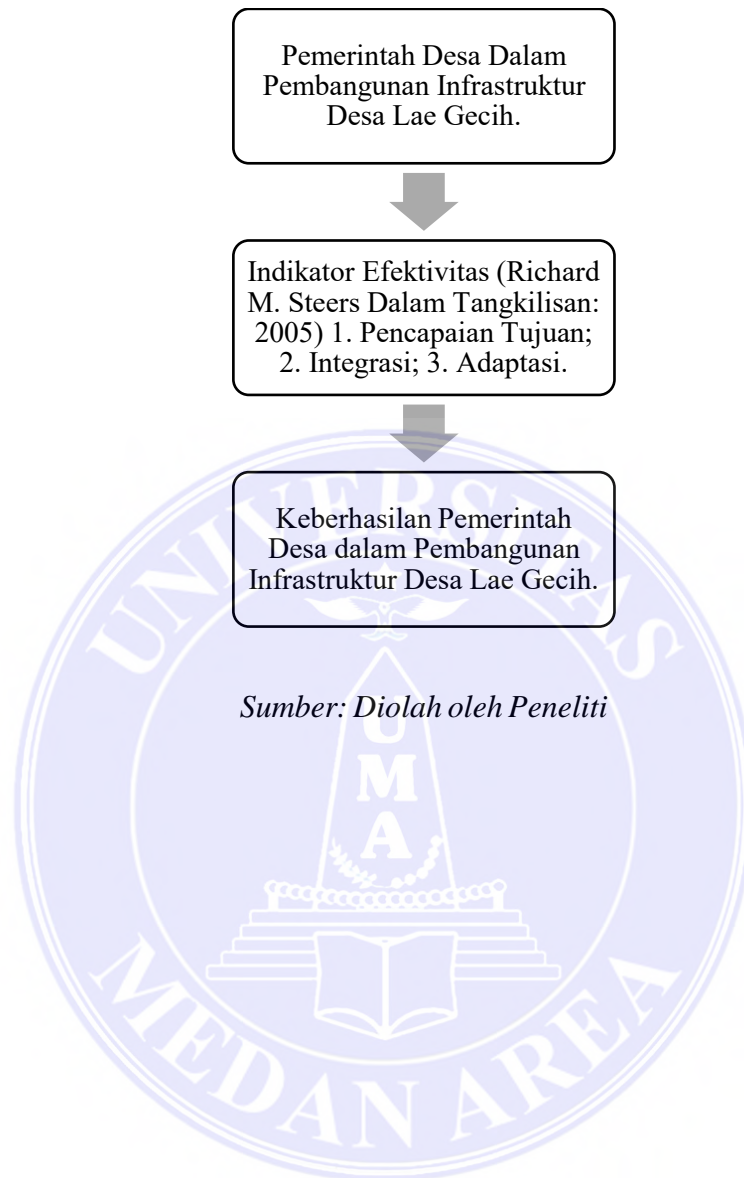
Desa Lae Gecih adalah salah satu desa yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pada tahun 2017-2022 pembangunan infrastruktur Desa Lae Gecih yang alokasi anggarannya berasal dari dana desa menyelesaikan beberapa pembangunan jalan untuk mengakses ladang atau perkebunan masyarakat. Namun peneliti sekaligus warga Desa Lae Gecih melihat bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak selesai dengan cepat atau lambat.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017-2022, masalah penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Strees dalam Tangkilisan (2005) yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tahun 2017-2022.

Adapun kerangka kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis. Menurut Usman (2009), penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif bermaksud membuat penyandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Menurut Sugiyono (2015), menyatakan metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana penelitian adalah instrumen kunci pengambilan sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan indikator yang akan diteliti. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode penelitian kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Dilakukan dalam kondisi yang alamiah.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul bersifat atau berbentuk kata-kata, gambar, dan tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada suatu proses.

4. Penelitian kualitatif ini lebih melakukan analisis data secara induktif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2022.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik *purposive* sampling dalam menentukan informannya. *Purposive* sampling merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang saling berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian Informan yang dimaksud dalam suatu proses kegiatan penelitian ini adalah aparatur dan tokoh masyarakat. Pengertian informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi tiga diantaranya;

1. Informan Kunci

Informan Kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami tentang informasi utama. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah

pimpinan organisasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini informan kunci yang ditujukan oleh penulis adalah sekretaris desa Lae Gecih.

2. Informan Utama

Informan Utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini informan utama yang ditujukan oleh penulis adalah Kaur Pembangunan dan Kaur Umum.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan tambahan dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan umum. Informan tambahan ini akan penulis tujukan kepada masyarakat yang ada di Desa Lae Gecih.

Tabel 3.1 Informan

Informan	Nama	Jabatan
Utama	Tigor D. L Padang	Sekretaris Desa
Kunci	Janhot Sinaga	Kaur Pembangunan
	Virgo E. TGR, S.Ak.	Kaur Umum
Tambahan	K. Tumangger	Masyarakat
	J. Tumangger	
	S. Berutu	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”, (Moleong, 2007).

Langkah awal dalam proses wawancara yaitu, memberitahu topik atau tema yang akan di bahas pada saat wawancara, setelah itu pihak instansi menentukan narasumber yang akan di wawancarai, kemudian penulis menyediakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, setelah proses wawancara berlangsung penulis menulis jawaban yang sudah disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, setelah mendapatkan jawaban atau informasi yang disampaikan dari narasumber dan proses wawancara telah selesai, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima

kasih kepada instansi yang terkait hingga kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan informasi kepada penulis.

2. Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012), observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan tidak terstruktur.

Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun 2017-2022. Secara sederhana observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung kolokasi penelitian. langkah yang pertama kali dilakukan dalam teknik observasi ini adalah, datang ke lokasi penelitian yaitu di Desa Lae Gecih.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, (Burhan, 2008). Teknik pengumpulan data dalam metode dokumentasi sering di contoh kan seperti dengan foto-foto baik dalam acara tertentu maupun dalam penelitian. Namun perlu di cermati bahwa yang

dimaksud dokumentasi tidak hanya foto-foto saja diantaranya, gambar, tulisan, buku, monografi, dan dokumen.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Langkah yang pertama kali dilakukan oleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah, foto bersama dengan sejumlah narasumber yang bersangkutan hingga mengambil foto-foto di instansi sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain. Menganalisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mendeskripsikannya menjadi satuan-satuan, mensintesakannya, meringkasnya dalam rumusan, memilih hal-hal penting dan pembelajaran serta kegiatan. kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat masuk ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif menganalisis data atau mendeskripsikan hasil penelitian suatu lapangan dengan kata-kata tanpa menganalisis angka kemudian menyajikan manajemen informasi dalam analisis deskriptif dimana menggambarkan masalah secara rinci Studi lapangan. Kemudian langkah-langkah data yang

dihasilkan dikurangi, kemudian menyajikan data, menarik kesimpulan dan terakhir memvalidasi informasi.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga akhir agar datanya jenuh. Fungsi analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diterima dari lapangan cukup besar, sehingga harus dicatat secara cermat dan detail. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin besar, kompleks, dan kompleks jumlah datanya. Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan melalui reduksi data. Reduksi data berarti meringkas, menggali hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan penting, mencari tema dan pola, menghilangkan yang tidak perlu dan mengkoordinasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan dapat dibuktikan kebenarannya.

b. Penyajian Data

Alur kegiatan analisis data penting lainnya adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan data yang disusun secara lebih sistematis yang memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, bagan alir, dll. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam hal ini, peneliti menyajikan materi sebagai teks, mungkin

berguna untuk menambahkan tabel atau gambar untuk menjelaskan hasil penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Membuat kesimpulan pada dasarnya berarti makna dari informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, dari pengumpulan data awal, peneliti mencoba memaknai data yang dihasilkan, mencari pola, desain, kesamaan tema, alur sebab akibat dan hal-hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan masih belum jelas, namun lama kelamaan kesimpulan semakin jelas karena semakin banyak informasi yang mendukung proses selanjutnya. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian. Singkatnya, kebenaran, kekokohan dan penerapan makna yang muncul dari data harus diuji untuk mempercayai kebenarannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Lae Gecih jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya. Pembangunan di Desa Lae Gecih bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunan sudah meningkat, antara lain akses jalan, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrastruktur jalan terlebih dahulu sehingga memudahkan masyarakat untuk mengangkut setiap hasil tani terlebih sawit yang sebelumnya agak susah untuk diakses.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini Bupati Aceh Singkil diharapkan agar turut mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lae Gecih. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah Daerah, akan meminimalisir adanya kesalahan dan penyelewengan anggaran.

2. Kepada Perangkat Desa Lae Gecih dalam hal ini Kepala Desa Lae Gecih agar transparan dalam pembangunan infrastruktur. Serta menjaga dan memelihara fasilitas umum yang telah diselesaikan.

3. Kepada seluruh masyarakat Desa Lae Gecih supaya ikut ambil bagian dalam setiap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lae Gecih.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *KAMUS KOMUNIKASI*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Fandi, Sagai, 2014. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: Erlangga.
- Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Pembangunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lemhannas. 1996. *Pembangunan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Safi'i, Muhammad, 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averros Press.
- Siagian. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Steers. M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarto, Agus, 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Susanto, Astrid S. 1975. *Efektivitas*. Bandung: Bina Cipta
- Ulum. Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik* (h. 294). Malang: UMM Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, 2003. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal dan Skripsi

- Arlis. 2020. Efektivitas fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Asnawi. 2013. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota (hlm.6). Malang: FISIP, UMM.
- Belaya, Dora Primapurnama. 2019. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah). Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dison, R., Suharno, dan R. S. Sinaga. 2022. Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (4): 11760
- Irfan. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri.
- Komblong, Makmur dan Suriyani, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaa Pembangunan.” (*Jurnal Dunn*, 3003:429).
- Manalu, F. C. S., Lubis, M. S. & Sinaga, R. S. (2021). Analysis of the Effectiveness of Employee Performance in Improving Public Services at the Bagan Sinembah Sub-District Office, Rokan Hilir Regency, Riau Provinc. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4 (3): 4219.
- Nirwana. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pulungan, M. F., N. S. S. Siregar., & R. S. Sinaga. 2021. Analisis Efektivitas Kinerja Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan. *PERSPEKTIF*. 764.
- Ritonga, Fitrah Anugrah. 2017. Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Rosita, Ayu. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Desa Tapong Kecamatan Tellu Limpoe). Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Simamora, R. K. & R. S. Sinaga. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. 80.
- Sumiati, Mardiana, S. & Sinaga, R.S. (2021). The Effectiveness Of Archievements In Improving Administrative Services In The Government Section In The Office Of The Regent Of The Regency Of Batu Bara. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 13 (2): 328.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa (Vol. 7 No. 1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Jakarta.

Internet dan UU

amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/19/14142941/dana-desa-dih

Infrastruktur. <http://e-journal.uajy.ac.id/11445/2/TS140922.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Permata press. Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 (h.117).

UU Nomer 06 tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomer 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12.



LAMPIRAN

**LAMPIRAN
PEDOMAN OBSERVASI**

**EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LAE GECIH KECAMATAN SIMPANG
KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVISI ACEH 2017-2022**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
 Nama Program : Pemangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih
 Lokasi : Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
 Tanggal : 09 November 2022

No.	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi	√		Dilihat saat observasi turun lapangan.
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	√		Dilihat saat observasi turun lapangan
3	Sikap Pegawai	√		Baik dan ramah
4	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet	√		Dilihat saat observasi turun lapangan

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lae Gecih
Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh 2017-2022

A. Identitas Responden

1) Identitas Informan Pertama

1. Nama : Tigor D. L Padang
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 48
4. Pekerjaan : Sekretaris Desa

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Pemerintah desa bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa
2. (Apa yang mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut)?
Masyarakat dan bentuk pengabdian, tugas serta tanggungjawab kita sebagai pemerintahan terhadap masyarakat.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Tentu sudah tepat waktu dan juga tepat sasaran
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya karena masyarakat sendiri yang dilibatkan dalam mengerjakan infrastruktur
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Masyarakat desa.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Melalui musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya ada di faktor cuaca yang terkadang tidak jelas.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya untuk memberikan arahan, karena tanah masyarakatlah yang dijadikan menjadi jalan.

9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Tergantung dari program atau perencanaan Desa.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Memudahkan akses jalan untuk masyarakat yang mayoritas petani untuk mengangkat hasil taninya.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Pengerukan air untuk membuat jalan mengakibatkan pengikisan tanah.

2) Identitas Informan Kedua

1. Nama : Janhot Sinaga
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 45
4. Pekerjaan : Kaur Pembangunan

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Pembangunan infrastruktur ini membuat pembangunan di Desa lebih meningkat.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Sudah tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan dan juga tepat sasaran.
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya dilibatkan.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Masyarakat desa dan perangkat desa.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Melalui musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya ada di faktor cuaca yang terkadang tidak jelas. Terkadang hujan datang di sore hari padahal di pagi hari sampai siang hari matahari terik. Ada

juga masyarakat yang tidak memberikan sedikit lahannya untuk dijadikan jalan. Katanya karena tidak ingin lahan ladangnya berkurang luasnya.

8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya dilibatkan.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama masyarakat.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Akses jalan untuk ke ladang dan perkebunan semakin lancar.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Tidak ada.

3) Identitas Informan Ketiga

1. Nama : Virgo E. TGR, S.Ak
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 27
4. Pekerjaan : Kaur Umum

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Kepala desa dan masyarakat desa melalui musyawarah desa bersama BPD.
2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mengangkut hasil tani dan kebun seperti mengangkut sawit.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Iya sudah tepat waktu karena pembangunannya sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan juga tepat sasaran karena memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya masyarakat dilibatkan karena untuk masyarakatlah pembangunan infrastruktur tersebut. Dan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalanan ini adalah tanah masyarakat.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Masyarakat desa, kepala desa dan perangkat desa serta BPD.

6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Dengan melakukan musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya ada di akses jalan yang kurang memadai sehingga untuk mengangkut alat dan bahan sangat sulit apalagi kalau waktu hujan jalanan menjadi licin karena sebagian jalan belum di sertu.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya masyarakat dilibatkan karena masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sewaktu musyawarah bersama masyarakat.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Dengan adanya program infrastruktur ini maka proses pengangkutan hasil tani dan perkebunan dari ladang dan perkebunan semakin lancar.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Sejauh ini tidak ada dampak negatifnya karena dengan adanya program infrastruktur ini sangat menguntungkan masyarakat.

4) Identitas Informan Keempat

1. Nama : K. Tumangger
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Petani

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Kepala desa melakukan musyawarah bersama masyarakat dan pemerintah desa.
2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini saya sangat terbantu untuk mengangkut hasil panen saya.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Iya sudah.

4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya sudah dilibatkan.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Masyarakat desa, kepala desa dan perangkat desa serta BPD.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Dengan melakukan musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya ada di akses jalan yang kurang memadai sehingga untuk mengangkut alat dan bahan sangat sulit apalagi kalau waktu hujan jalanan menjadi sangat licin dan becek karena sebagian jalan belum di sertu.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya masyarakat dilibatkan.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sewaktu musyawarah.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Dengan adanya program pembangunan infrastruktur ini maka proses pengangkutan hasil tani dan perkebunan semakin lancar.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Karena jalannya sudah ada maka untuk mengangkut hasil sawit pakek mobil *pick up* atau truk yang bolak-balik maka jalannya cepat rusak sehingga terkadang truk atau *pick up* tersangkut di jalan sehingga jalan cepat rusak dan mobilnya juga rusak.

5) Identitas Informan Kelima

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Nama | : J. Tumangger |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. Umur | : 70 |
| 4. Pekerjaan | : Petani |

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa.

2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Pembangunan infrastruktur ini benar-benar sangat membantu masyarakat dan juga pembangunan di desa ini juga bertambah.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Ada yang tepat waktu ada juga yang tidak. Karena cuaca kadang tidak jelas. Tapi kalau tepat sasaran sudah pastilah tepat sasaran.
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya dilibatkan.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Seluruh masyarakat desa dan perangkat desa.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Melalui musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya mungkin cuaca ya. Soalnya kadang-kadang kan cuaca ini tidak menentu.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya dilibatkan karenakan yang dijadikan jalan ini kan tanah milik masyarakat.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama masyarakatla waktu musyawarah.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Akses jalan untuk ke ladang dan perkebunan semakin lancar.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Tidak ada.

6) Identitas Informan Keenam

1. Nama : S. Berutu
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 25
4. Pekerjaan : Petani

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Pemerintah desa sama masyarakat.
2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Pembangunan infrastruktur ini membuat pembangunan di Desa lebih meningkat dan membantu masyarakat.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Sudah tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan dan juga tepat sasaranlah.
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya dilibatkan.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Masyarakat desa dan perangkat desa.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Pemerintah mengajak masyarakat bermusyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya itu kan karena cuaca yang kadang-kadang tidak jelas. Pagi-pagi nanti cerah kali tiba nanti siang atau sore hujan deras.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya dilibatkan. Karena kan yang dijadikan jalan itu kan tanah kita ya.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Biasanya itu sesuai sama yang sudah disepakati bersama masyarakat waktu musyawarah.
10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Kita jadi lebih mudah dan cepat membawa sawit ya.

11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Dampak negatifnya tidak ada. Kan kita jadi lebih cepat bawa sawit sama hasil ladang.

7) Identitas Informan Ketujuh

1. Nama : N. Sembiring
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 35
4. Pekerjaan : Petani

Pertanyaan – pertanyaan

1. (Siapa yang merencanakan program pembangunan infrastruktur ini)?
Pemerintah desa bersama dengan masyarakat.
2. (Bagaimana tanggapan Anda terhadap pembangunan infrastruktur ini)?
Pembangunan infrastruktur ini sangat membantu masyarakat.
3. (Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah selesai tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya)?
Sudah dilaksanakan tepat waktu dan juga tepat sasaranlah.
4. (Apakah saat rapat perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan)?
Iya dilibatkan.
5. (Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program infrastruktur ini)?
Orang-orang yang terlibat masyarakat dan perangkat desa Le Gecih.
6. (Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut)?
Melalui musyawarah desa.
7. (Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut)?
Kendalanya itu ada difaktor cuaca.
8. (Apakah dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan infrastruktur tersebut)?
Iya dilibatkan. Karena wilayah ataupun lahan yang akan dijadikan jalan adalah milik masyarakat.
9. (Kapan saja dilaksanakan program infrastruktur pembangunan di Desa ini)?
Sesuai sama yang sudah ditentukan dan disepakati waktu musyawarah desa.

10. (Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Kita jadi lebih mudah dan cepat untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang.
11. (Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program infrastruktur ini)?
Dampak negatifnya tidak ada. Karena masyarakat sangat terbantu untuk mengakses ladang dan perkebunan.



LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Foto bersama informan 1 (Sekdes)



Foto bersama informan 2 (Kaur Pembangunan)



Foto bersama informan 3 (Kaur Umum)



Foto bersama informan 4 (Masyarakat)



Foto bersama informan 5 (Masyarakat)



Foto bersama informan 6 (Masyarakat)



Foto bersama informan 7 (Masyarakat)



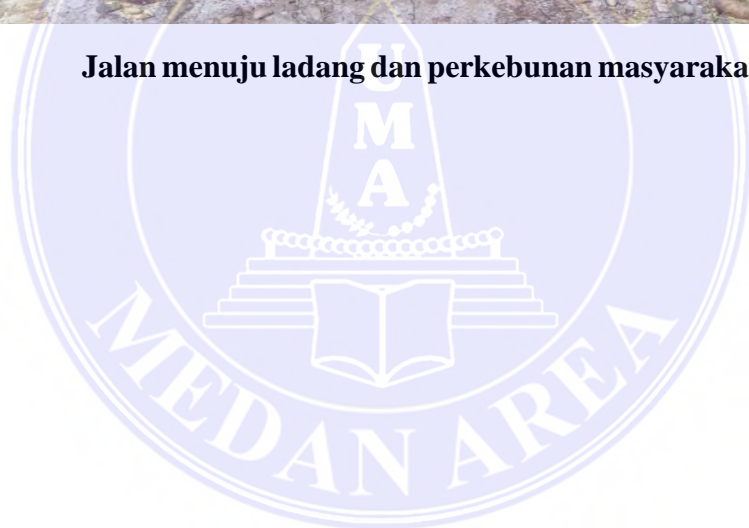
Kantor desa Lae Gecih







Jalan menuju ladang dan perkebunan masyarakat



LAMPIRAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1144/FIS.1/01.10/X/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

25 Oktober 2022

Yth,
Ka. Desa Lae Gecih Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Siti Nurica Tumangger
N P M : 198510029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Lae Gecih Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, dengan judul Skripsi "*Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh 2017-2022*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



LAMPIRAN SURAT SELESAI PENGAMBILAN DATA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SIMPANG KANAN
KAMPUNG LAE GECIH
Jalan Lintas Aceh - Sibolga

Nomor : 470.74/LG/M/2022
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Lae Gecih, 25 November 2022
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Di,-

Medan

Menindaklanjuti Surat Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area No : 1144/FIS 1/01.10/X/2022 Perihal : Pengambilan Data/Riset Yang Diserahkan Pada Tanggal 25 Oktober 2022 Untuk maksud tersebut Dengan ini kami menyatakan bahwa :

No	NAMA	NPM	PRODI
1	SITI NURICA TUMANGGER	198510029	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan pengambilan data/riset untuk dapat digunakan dalam penyusunan skripsi

Demikian kami sampaikan atas Kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Kepala Kampung Lae Gecih

DOMU HENKI BERUTU

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

foto

Nama : Siti Nurica Tumangger
Tempat dan Tgl Lahir : Lae Gecih, 23 Maret 2001
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Pendidikan Formal :
2019 – 2023 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA
2016 – 2019 SMK Negeri 1 Sidikalang
2013 – 2016 SMP Negeri 2 Simpang Kanan
2007 – 2013 SD Negeri Tuhtuhan

Alamat Rumah : Desa Lae Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh
Singkil, Provinsi Aceh

E-mail : icatumangger23@gmail.com

Tlf/ Hp : 081262391359